

Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan BUMDes: Di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto

Gregorius Renevilota¹, Drs.M.Kendry Widiyanto, M.Si², Hasan Ismail. S.AP.,M.AP³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

A B S T R A K

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

gregoriusrenetilota@gmail.com

kenronggo@untagsby.ac.id

hasanismaail@untag-sby.ac.id

Sinergi antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDes di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto adalah elemen penting untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi desa. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna menyelidiki partisipasi berbagai pihak dalam manajemen BUMDes. Data dianalisis menggunakan Teori Stakeholder Model Nugroho, yang menekankan pentingnya hubungan dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan yang sama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program BUMDes. Keterbukaan dalam pengelolaan dana, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, serta komunikasi yang baik menjadi faktor-faktor krusial dalam meningkatkan daya saing usaha di desa. Selain itu, dukungan dari para pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan lembaga terkait juga memperkuat ekosistem bisnis di desa. Oleh karena itu, sinergi yang terencana dan berbasis kepercayaan antara para pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong perkembangan BUMDes yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sinergitas, Stakeholder, BUMDes, Pengembangan Desa, Mojokerto*

A B S T R A K T

Synergy between stakeholders in the development of BUMDes in Centong Village, Gondang District, Mojokerto Regency is an important element in creating sustainable village economy. This study applies qualitative method with case study approach to investigate the participation of various parties in BUMDes management. Data were analyzed using Nugroho Stakeholder Model Theory, which emphasizes the importance of relationships and interests among stakeholders in achieving the same goals.

The research findings show that cooperation between the village government, BUMDes management, and the community greatly influences the success of the BUMDes program. Transparency in fund management, active community participation in planning, and good communication are crucial factors in increasing business competitiveness in the village. In addition, support from external stakeholders such as investors and related institutions also strengthens the business ecosystem in the village. Therefore, planned and trust-based synergy between stakeholders is very important to encourage sustainable BUMDes development..

Keywords: Synergy, Stakeholders, BUMDes, Village Development, Mojokerto



PENDAHULUAN

Kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk meningkatkan kinerja governance dalam pengembangan ekonomi lokal (Samosir et al., 2026). (Samosir et al., 2026) Pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian desa dengan menggali potensi lokal dan mengembangkan usaha yang bernilai ekonomi tinggi. Namun, keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya bergantung pada internal desa, melainkan juga pada sinergitas dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga keuangan.

Sinergitas antara stakeholder menjadi faktor kunci dalam pengembangan BUMDes, karena keterlibatan multi-pihak memungkinkan terciptanya akses permodalan, inovasi usaha, dan pemasaran yang lebih luas. Pemerintah desa berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara masyarakat berkontribusi sebagai penggerak utama dalam operasionalisasi BUMDes. Di sisi lain, sektor swasta dapat berfungsi sebagai mitra strategis yang memberikan dukungan dalam aspek teknologi, pemasaran, dan investasi, sedangkan lembaga keuangan menyediakan akses modal untuk mempercepat pertumbuhan usaha desa.

Meski demikian, tantangan dalam membangun sinergitas stakeholder masih kerap ditemui, seperti koordinasi yang kurang efektif, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang mampu memperkuat hubungan antar-stakeholder, serta kebijakan yang mendorong transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan BUMDes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas stakeholder dalam pengelolaan BUMDes, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa dan pelaku usaha dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

KAJIAN TEORI

Konsep Administrasi Pembangunan

(Siagian, 2007) menyatakan bahwa administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi, dan (2) pembangunan. Administrasi berarti keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nationbuilding). Siagian (2007), akhirnya, mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai : Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. (Handyaningrat, 1998) menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang oleh karena adanya kebutuhan nyata yang disarankan oleh suatu masyarakat terhadap ilmu tertentu. Secara falsafati, fungsi ilmu dalam kehidupan manusia adalah untuk membantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Bagi negara-negara yang digolongkan kepada Dunia Ketiga dirasakan bahwa teori-teori dan prinsip-prinsip dari ilmu administrasi Negara tradisional yang terutama di dunia barat, khususnya di Amerika Serikat, sudah tidak memadai terhadap kebutuhan bagi negara-negara yang sedang giat melakukan pembangunan. Negara yang sedang berkembang/membangun atau Dunia Ketiga tersebut menyadari

semakin besarnya jurang pemisah antara Negara yang sudah maju dengan Negara berkembang. Mereka berusaha mengatasi masalah- masalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain, dengan melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Oleh karena itu para ahli mulai mengalihkan pikiran, perhatian serta waktunya terhadap cabang ilmu administrasi yang relevan dengan negara-negara yang sedang berkembang. Ilmu administrasi yang dipandang dapat mengatasi masalah-masalah itu tersebut ilmu administrasi pembangunan. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan pada waktu yang bersamaan timbul perkembangan-perkembangan mengenai substansi yang menjadi objek penelitian dalam bidang pengetahuan baru. Dalam ilmu administrasi, misalnya, timbul perkembangan ilmu administrasi negara, ilmu administrasi niaga, ilmu organisasi, ilmu manajemen dan sebagainya. Demikian pula, ilmu administrasi pembangunan berkembang menjadi disiplin ilmiah tersendiri karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan tujuan Negara sifatnya visioner dan dinamis. Kedua hal ini mewujudkan kompleksitas, dan tidak cukup didekati hanya satu sisi saja. Sebagai contoh, isu mengenai gender atau peran wanita (ibu) dalam pembangunan manusia maupun isu profesionalisme dan akuntabilitas serta good governance dalam pemerintah merupakan perkembangan yang populer (Ernawan, 2006) Sebagai konsekuensinya, berbagai teori dan pendekatan terhadap pembangunan dikembangkan oleh para ahli, dan pada gilirannya menjadikan administrasi pembangunan sebagai pendekatan yang multidimensi dalam memahami pembangunan. Secara historis, Siagian (2007:6) mengemukakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah yang relatif baru menunjukkan bahwa usaha para pakar untuk mengembangkan teori administrasi pembangunan sesungguhnya telah mulai setelah Perang Dunia II berakhir, yang kemudian berlanjut secara lebih intensif pada dekade enam puluhan Siagian selanjutnya mengemukakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, timbul pola baru dalam hubungan antar bangsa. Pola pertama ialah bahwa di satu pihak terdapat Negara-negara yang menang perang – pihak sekutu – dan di pihak lain ada Negara-negara yang kalah perang. Salah satu akibat negatif dari suatu peperangan ialah morat-maritnya kehidupan perekonomian yang tentunya lebih terasa oleh negara-negara yang kalah perang ketimbang Negara-negara yang menang perang. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa Negara-negara pemenang perang dengan pertimbangan politik, ekonomi dan kemanusiaan, menunjukkan hasrat untuk membantu Negara-negara yang sangat menderita, termasuk negara-negara sekutu maupun negara yang kalah perang. Usaha pemerintah Amerika Serikat untuk membantu negara-negara tersebut terkenal dengan nama Marshall Plan. Kelak, Marshall Plan menjadi model cara memberi bantuan oleh suatu negara ke negara lain. Fakta sejarah ini perlu dikemukakan karena erat relevansinya dengan tumbuh dan berkembangnya administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu. Para pakar dan ilmuwan Amerika Serikatlah yang mempelopori pertumbuhan dan perkembangan tersebut, khususnya mereka yang bergabung dalam asosiasi profesi yang dikenal dengan nama Comparative Group, satu kelompok ilmuwan yang merupakan spesialis perbandingan administrasi disebut dengan American Society for Public Administration (ASPA). Pola Kedua yang timbul dalam hubungan antar negara ialah bahwa di satu pihak terdapat negara-negara bekas penjajah dan pihak lain terdapat negara-negara baru, yaitu Negara bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaan dengan berbagai cara, yang hampir seluruhnya terdapat di Benua Afrika dan Asia. Negara-negara tersebut dan ditambah Negara-negara miskin di Amerika Latin dan di sekitar Laut Karibia semuanya ingin maju dan berkembang untuk menjadi Negara yang kuat. Wahana untuk itu tiada lain dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan. terdapat suatu fenomena menarik yaitu dimana negara bekas penjajah ingin memelihara hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara bekas jajahnya.



Salah satu manifestasi dari keinginan tersebut adalah mengalirnya berbagai bantuan dari negara bekas penjajah tersebut kepada negara bekas jajahannya. Pemberian bantuan ini merupakan fenomena aktual yang ada pada gilirannya mendorong percepatan perkembangannya ilmu administrasi pembangunan. Menurut (Kartasasmita, 2007) sejak kelahirannya, pendekatan ilmu administrasi Negara selalu berhubungan dengan ilmu politik. Bahkan, tulisan Woodrow Wilson (1887) yang menjadi cikal bakal ilmu administrasi merupakan upaya menajamkan fokus bidang studi politik, yaitu membuat pemisahan antara politik dengan administrasi. Dalam perkembangan berikutnya, papar Kartasasmita, ilmu administrasi diperkuat dengan berkembangnya konsep-konsep manajemen seperti manajemen ilmiah dari Taylor (1912), Fayol (1916) sampai pada pemikiran Drucker (1989). Ilmu administrasi terus berkembang dan melahirkan cabang yang spesifik dengan objek kajian Negara yaitu administrasi Negara. Sejarah berakhirnya perang yang melahirkan fenomena baru membukakan mata para pakar mengenai perbedaan administrasi Negara pada Negara-negara maju dengan negara berkembang atau negara-negara miskin. Pada dasarnya, rentetan sejarah Perang Dunia lah yang menjadi kerangka dasar pembentukan administrasi pembangunan sebagai ilmu. Persoalan-persoalan praktik yang tidak bias secara langsung dihadapi oleh administrasi Negara, mengingat adanya perbedaan administrasi Negara bekas jajahan, Negara berkembang atau Negara miskin yang ingin maju.

Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu-ilmu sosial dapat dibagi menjadi dua paradigma penting, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995, Tikson, 2005). Paradigma modernisasi meliputi teori makro pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori mikro nilai individu yang mendukung proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori keterbelakangan (underdevelopment), ketergantungan (dependen development) dan teori sistem dunia (world system theory) menurut klasifikasi Larrain (1994). Sekaligus (TIKSON, 2005) membagi teori ini. Pembangunan menjadi tiga klasifikasi, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir sekitar tiga abad sebelum lahirnya teori pembangunan. Dengan demikian, berbagai diskusi tentang teori dan praktik pembangunan sudah termasuk dalam kerangka kapitalisme. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori evolusi. Gerakan teori modernisasi untuk mengubah cara produksi di masyarakat berkembang sebenarnya merupakan upaya untuk mengubah cara produksi dari pra-kapitalis menjadi kapitalis, seperti yang digunakan negara-negara maju untuk menirunya. Selain itu, Teori Ketergantungan berdasarkan analisis Marxis dapat dikatakan memunculkan kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan pekerja) ke tingkat transnasional (pusat dan pinggiran), selama analisis inti, yaitu eksploitasi. Demikian pula teori sistem dunia berdasarkan teori teori ketergantungan menganalisis masalah kapitalisme dengan unit analisis dari dunia sebagai satu-satunya sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis.



METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif, karena dalam penelitian kualitatif data yang diambil dan menjadi patokan penelitian merupakan data dari hasil observasi, wawancara, catatan dokumen, catatan data lapangan, potret, dan disusun peneliti di lokasi. Hasil dari penelitian kualitatif juga tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.

Hakikat penelitian ini mengacu pada pendapat Nugroho yang menyatakan bahwa Teori Stakeholder menurut (Nugroho, 2015) dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya melibatkan tiga stakeholder yang saling terkait yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda yang perlu dipahami agar pengembangan wisata di suatu daerah dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, analisis dapat dilakukan menggunakan indikator dari teori stakeholder yang dikemukakan oleh Nugroho, yaitu Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Pelaksana, dan Akselerator.

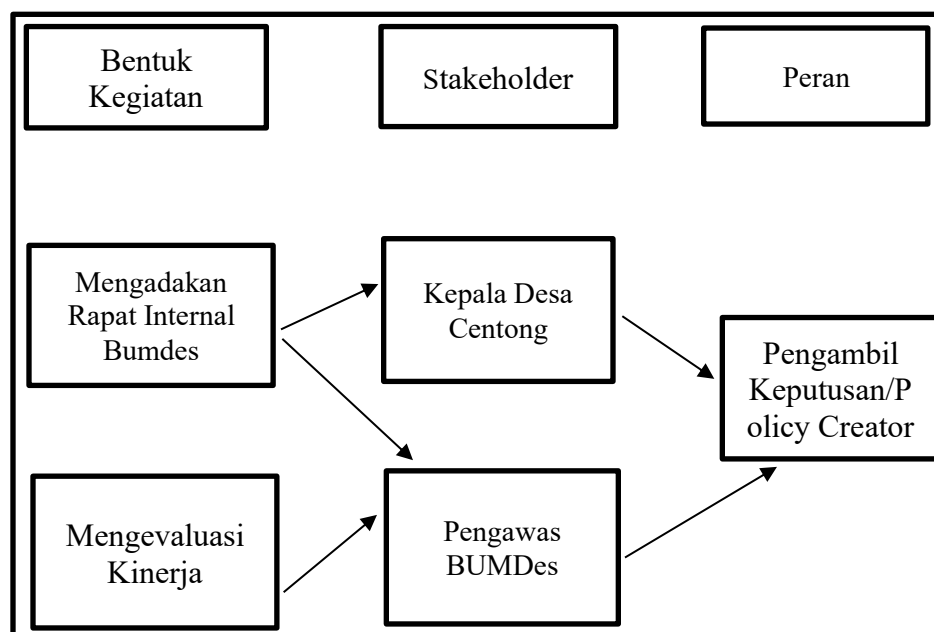
Policy Creator

Dalam Teori Stakeholder menurut Nugroho maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam teori stakeholder tersebut adalah Policy Creator. Menurut Nugroho Policy Creator merupakan stakeholder yang berperan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan

Dalam hal ini bahwa kepala desa dan pengawas BUMDes memiliki peran penting yang saling mendukung untuk memastikan efektivitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha desa. Kepala desa berfungsi sebagai pembuat keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus memastikan partisipasi semua pihak melalui pertemuan dan evaluasi rutin. Di sisi lain, pengawas berfungsi menjaga integritas dalam operasi dan keuangan BUMDes dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pelaporan kepada pertemuan desa. Proses pemilihan dan pemecatan pengawas juga menjadi elemen penting untuk mempertahankan profesionalisme dan kredibilitas dalam pengawasan. Kerja sama antara perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan inilah yang menjadi dasar utama bagi kelangsungan dan keberhasilan BUMDes.

Peran stakeholder dalam pembuatan kebijakan BUMDes dapat digambarkan sebagai berikut:
Peran stakeholder dalam pembuatan kebijakan (Policy Creator)

Gambar 1.1 Peran stakeholder dalam pembuatan kebijakan



Terdapat 2 (dua) stakeholder yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Policy Creator) yaitu Kepala Desa Centong dan Pengangawas BUMDes “Sambi Jaya Centong” Policy creator yaitu stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan (Nugroho). Gambar ini menjelaskan tanggung jawab dalam pengelolaan BUMDes, di mana Kepala Desa Centong berperan sebagai pembuat kebijakan melalui kegiatan seperti rapat internal untuk menetapkan arah dan kebijakan strategis BUMDes, sementara Pengawas BUMDes menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi kinerja agar pelaksanaan program dan usaha desa tetap akuntabel dan sesuai tujuan. Sinergi ini mencerminkan pembagian peran yang jelas antara pembuat keputusan dan pengawas, sehingga memastikan tata kelola BUMDes berlangsung secara profesional, partisipatif, dan berorientasi pada kemajuan desa. Jika diperlukan, struktur ini bisa dijadikan contoh praktik baik dalam pengelolaan usaha milik desa lainnya.

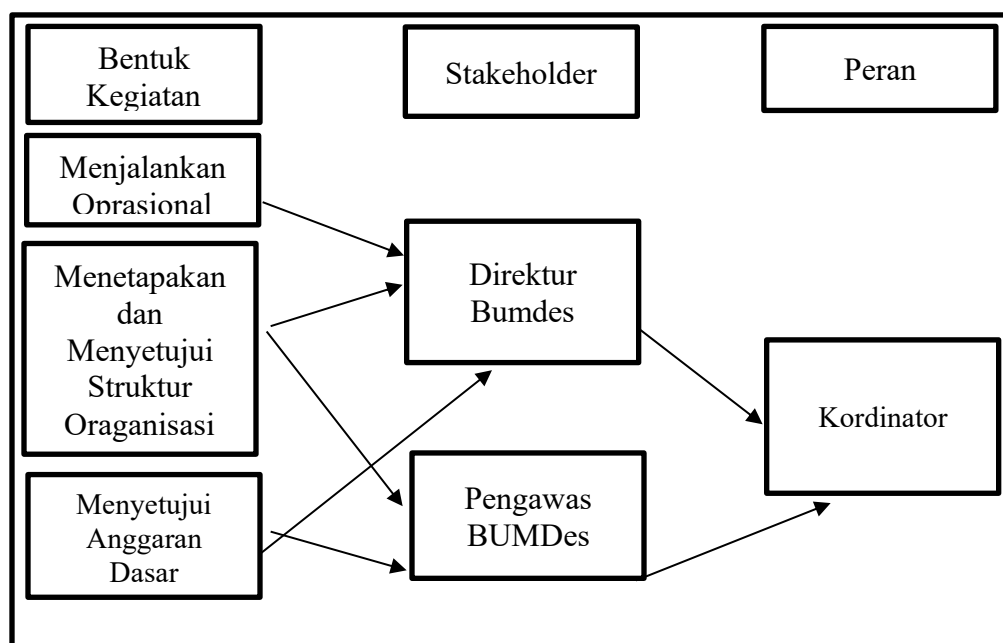
Kordinator

Dalam Teori Stakeholder menurut Nugroho maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam stakeholder tersebut adalah Kordinator. Menurut Nugroho Kordinator adalah stakeholder yang bertugas mengordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam program

Dalam hal ini bahwa Direktur BUMDes memiliki posisi kunci dalam mengatur pengelolaan unit usaha desa agar sesuai dengan tujuan dan misi desa. Ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi bisnis dijalankan dengan efektif, menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah operasional. Keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara direktur, penasihat, pengawas, serta pihak luar seperti pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, musyawarah desa berfungsi sebagai saluran utama dalam penentuan kebijakan dan peraturan

yang mengatur jalannya BUMDes, termasuk dalam pembuatan dan perubahan anggaran dasar. Struktur organisasi BUMDes juga meliputi aspek ketenagakerjaan, di mana direktur dan tim memiliki kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan karyawan, kecuali untuk posisi sekretaris dan bendahara yang mengikuti peraturan khusus.

Gambar 1.2 Peran stakeholder dalam mengkordinasikan BUMDes



Terdapat 2 (dua) stakeholder yang terlibat dalam mengkordinasikan Program yaitu Direktur BUMDes dan Pengawas BUMDes “Sambi Jaya Centong” Koordinator yakni stakeholders yang berperan mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat (Nugroho). Gambar ini menunjukkan relasi antar peran dalam struktur organisasi BUMDes, dimulai dari Direktur BUMDes yang memiliki kewenangan menetapkan struktur organisasi sebagai bentuk legalitas formal melalui keputusan resmi. Selanjutnya, Pengawas BUMDes bertugas menyetujui dan mengawasi anggaran dasar sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Di sisi pelaksana, Direktur BUMDes menjalankan operasional sehari-hari BUMDes, dibantu oleh Koordinator Unit Usaha yang mengoordinasikan pelaksanaan teknis unit usaha di lapangan. Dengan demikian, tabel ini menampilkan garis koordinasi yang saling terhubung dan menggambarkan pentingnya kolaborasi antara unsur pengambil kebijakan, pengawas, dan pelaksana agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal dan akuntabel. Struktur semacam ini ideal dalam memastikan jalannya unit usaha desa secara profesional dan berkelanjutan.

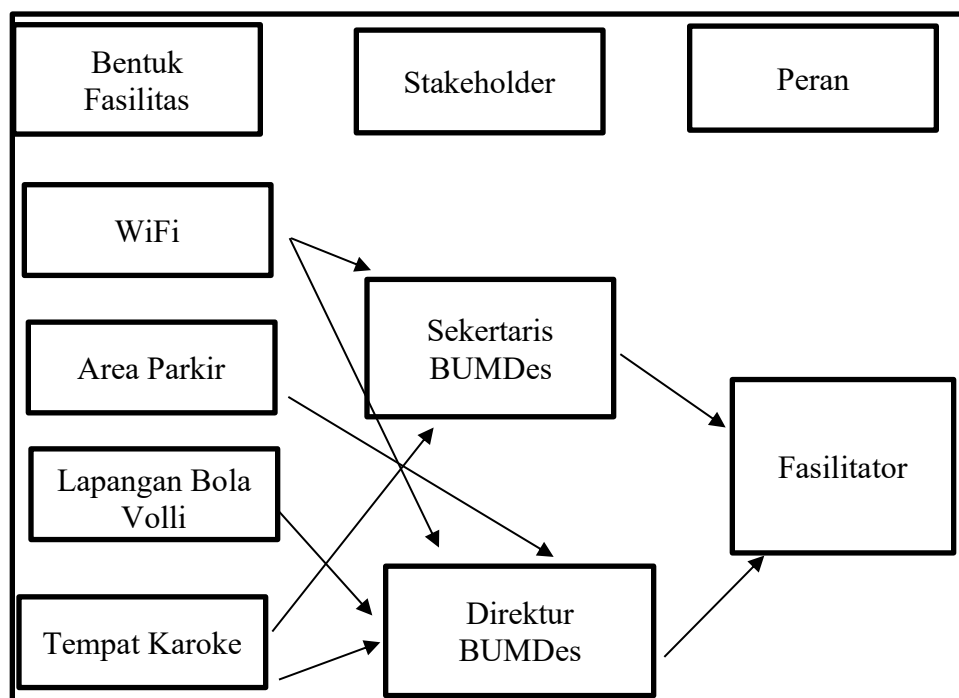
Fasilitator

Dalam Teori Stakeholder menurut Nugroho maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam teori stakeholder tersebut adalah Fasilitator. Menurut Nugroho Fasilitator adalah stakeholder yang menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan kelompok sasaran.

Dalam hal ini Sekretaris BUMDes memiliki tanggung jawab sebagai penghubung yang memastikan bahwa administrasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait berjalan dengan baik. Saya ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan, mencatat aktivitas usaha, serta mengatur pertemuan dengan mitra dan

pemerintah desa. Selain itu, saya juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik melalui sistem administrasi yang terorganisir dan efisien. Saya turut berperan dalam menjembatani pengelola BUMDes dengan masyarakat agar mereka lebih terlibat dalam pengembangan usaha desa. Dengan adanya koordinasi yang efektif, saya berupaya menciptakan suasana kerja yang mendukung sehingga BUMDes dapat beroperasi dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal untuk desa. Bersama dengan direktur, saya menyusun rencana untuk kegiatan unit usaha BUMDes, serta menentukan kebijakan internal organisasi BUMDes. Saya juga bekerja sama dengan direktur untuk mengembangkan dan menetapkan standar prosedur operasional dalam BUMDes, serta mengawasi semua kegiatan BUMDes bersama direktur.

Gambar 1.3 Peran stakeholder dalam memfasilitasi BUMDes



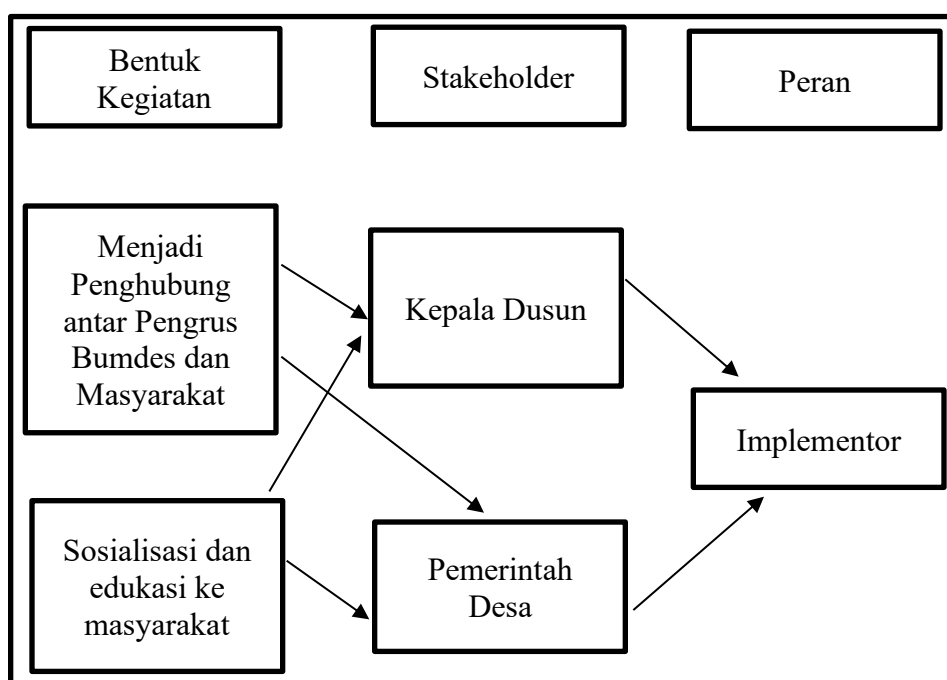
Terdapat 2 (dua) stakeholder yang terlibat dalam memfasilitasi program BUMDes yaitu Sekertaris BUMDes dan Direktur BUMDes “Sambi Jaya Centong” Fasilitator yakni stakeholders yang berperan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (Nugroho). Gambar ini menggambarkan hubungan antara fasilitas yang dikelola BUMDes dengan masing-masing stakeholder dan peran kedua stakeholder ini dalam operasionalisasi unit usaha tersebut. Fasilitas seperti WiFi, area parkir, lapangan bola voli, dan tempat karaoke dikelola dalam struktur yang melibatkan peran penting dari Sekretaris BUMDes, Direktur BUMDes. Sekretaris bertanggung jawab terhadap aspek administratif dan pendataan, Direktur BUMDes menjalankan fungsi utama sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan Fasilitator berperan dalam mendampingi dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Gamabar ini menegaskan pentingnya koordinasi antarperan agar pengelolaan berbagai fasilitas desa dapat berjalan efektif, akuntabel, dan mendukung kesejahteraan warga secara langsung.

Implementor

Dalam Teori Stakeholder menurut Nugroho maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam stakeholder tersebut adalah Implementor. Menurut Nugroho Implementor adalah stakeholder yang menjalankan kebijakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program

Dalam hal ini Kepala dusun desa memiliki peranan utama dalam mengelola dan mendukung kegiatan ekonomi desa. Ia terlibat langsung dalam berbagai sektor usaha, seperti pertanian, perdagangan, dan layanan, untuk memastikan perekonomian desa tetap aktif. Kami juga turut serta sebagai pengguna produk dan layanan yang ditawarkan oleh BUMDes, sehingga usaha yang ada tetap memiliki pangsa pasar yang kuat. Kepala Dusun kerap memberikan saran dan gagasan kreatif kepada pengelola, karena kami ingin agar bisnis desa dapat berkembang dan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan sosial sangat penting, sehingga kami juga berpartisipasi dalam promosi dan sosialisasi agar lebih banyak orang mengetahui produk BUMDes. Apabila terdapat masalah dalam operasional, kami bersedia bekerja sama untuk menemukan jalan keluar, karena kesuksesan BUMDes merupakan kesuksesan bersama yang memberikan manfaat bagi seluruh desa. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes, kami memastikan semua kebijakan dan langkah operasional dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Kami terus menjalin komunikasi dengan masyarakat dan pengurus BUMDes agar pengelolaan usaha desa berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kami juga berusaha mencari sumber dana tambahan untuk mengembangkan unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Jika ada tantangan dalam operasional, kami siap memberikan solusi serta mendukung program yang dapat memperkuat perekonomian desa.

Gambar 1.4 Peran stakeholder dalam menjalankan kebijakan BUMDes



Peran Implementor dalam program pengembangan BUMDes Terdapat 2 (dua) stakeholder yang terlibat yaitu Kepala Dusun dan Pemerintah Desa “Sambi Jaya Centong” Implementor yakni stakeholders yang berperan menjalankan kebijakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program mencukupi (Nugroho).



Gambar ini menggambarkan peran Kepala Dusun sebagai akselerator dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes, khususnya dalam menjembatani komunikasi antara pengurus BUMDes dan masyarakat. Dalam peran ini, Kepala Dusun bertindak sebagai implementor yang aktif turun ke lapangan melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program, fasilitas, atau unit usaha desa. Kehadirannya juga menciptakan koneksi dua arah—menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BUMDes sekaligus menjelaskan kebijakan dan rencana dari BUMDes kepada warga. Dengan pendekatan seperti ini, Kepala Dusun menjadi elemen kunci dalam mempercepat pemahaman, partisipasi, dan keberhasilan implementasi program BUMDes secara menyeluruh dan berkelanjutan. Struktur seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan tidak hanya terencana di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

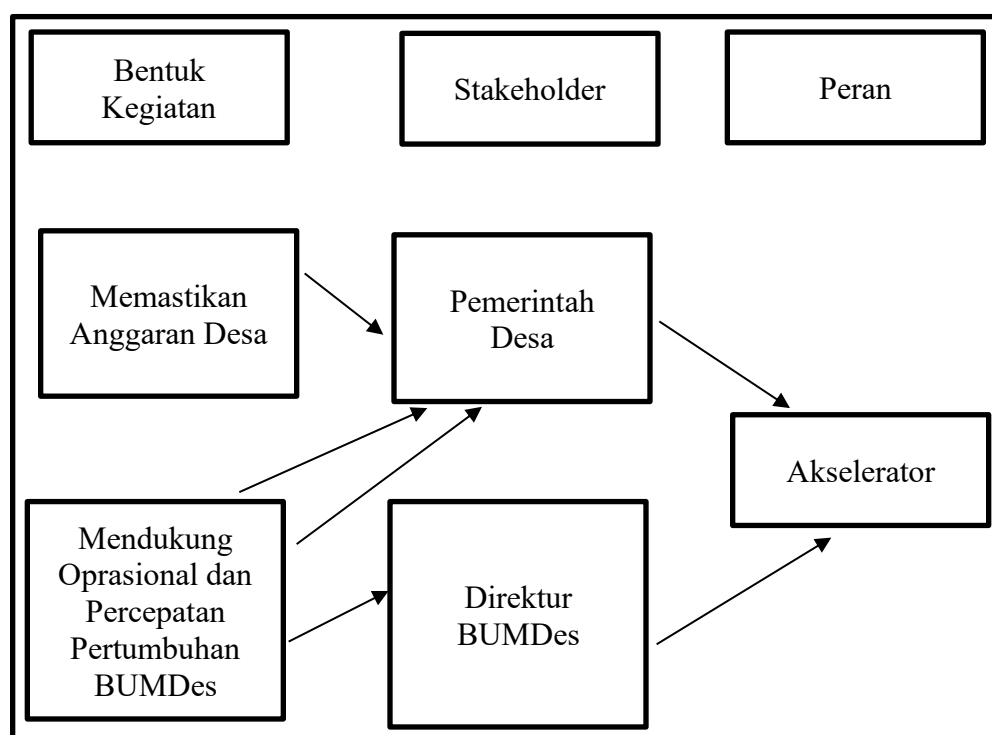
Akselerator

Dalam Teori Stakeholder menurut Nugroho maka yang menjadi salah satu variabel yang terdapat dalam stakeholder tersebut adalah Akselerator. Menurut Nugroho Akselerator adalah Stakeholders yang berkontribusi dalam mempercepat pelaksanaan program agar mencapai target lebih cepat.

Dalam hal ini pemerintah pemerintah desa masih menjalankan seluruh proses pengembangan dan pengelolaan BUMDes secara mandiri, tanpa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta. Pendekatan yang digunakan bersifat internal dan berbasis pada pemanfaatan anggaran murni dari dana desa. Dalam hal ini, Kepala Desa memegang peran sentral sebagai pengambil kebijakan yang menentukan alokasi dana desa untuk mendukung operasional dan percepatan pertumbuhan BUMDes. Kebijakan yang diterapkan menitikberatkan pada kemandirian desa dengan tidak bergantung pada dukungan investor eksternal. Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga sebagai akselerator dalam eksekusi strategi bisnis, memastikan bahwa pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dana desa digunakan sebagai sumber utama pembiayaan untuk menunjang seluruh kegiatan usaha, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia secara langsung demi kemajuan ekonomi desa.

Namun, meskipun belum melibatkan pihak luar, pengelolaan ini tetap dilakukan dengan semangat kolaboratif di tingkat internal, antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga kontrol dan arah kebijakan tetap berada di tangan desa, meski ke depan peluang untuk bermitra dengan pihak ketiga tetap terbuka, tergantung pada kebutuhan dan perkembangan usaha. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes saat ini mencerminkan model pembangunan berbasis desa yang mandiri, terencana, dan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

Gambar 1.5 Peran stakeholder dalam mempercepat pelaksanaan BUMDes



Terdapat 2 (dua) stakeholder yang terlibat dalam realisasi program BUMDes yaitu Pemerintah Desa dan Direktur BUMDes “Sambi Jaya Centong” Akselerator adalah Stakeholders yang berkontribusi dalam mempercepat pelaksanaan program agar mencapai target lebih cepat. (Nugroho). Gambar ini menunjukkan alur hubungan antara pemerintah desa dengan BUMDes dalam konteks pengelolaan anggaran dan dukungan operasional. Diagram ini menampilkan tiga komponen utama: Bentuk Kegiatan, Stakeholder, dan Peran. Dalam alurnya, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki kegiatan “Memastikan Anggaran Desa” dengan peran sebagai pemberi dukungan untuk mempercepat pertumbuhan BUMDes. Di sisi lain, Direktur BUMDes memegang peran sebagai akselerator, yaitu pelaksana utama yang mendukung operasional BUMDes agar tetap berjalan dan berkembang. Aliran panah menggambarkan bagaimana kebijakan dan dukungan pemerintah desa diarahkan ke tingkat operasional melalui direktur BUMDes, menandakan hubungan yang bersifat kolaboratif dan strategis untuk mendorong kemajuan ekonomi desa melalui unit usaha milik desa. Struktur ini menegaskan bahwa kelancaran BUMDes tidak bisa terlepas dari sinergi antara kebijakan desa dan pelaksana di lapangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas stakeholder dalam pengembangan BUMDes di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, masyarakat, investor, dan pihak eksternal memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha desa. Kepala Desa berperan sebagai policy creator yang menetapkan kebijakan strategis, sementara Direktur BUMDes bertindak sebagai koordinator yang menyelaraskan berbagai pihak untuk mendukung operasional usaha. Masyarakat sebagai implementor turut berperan dalam

*Corresponding author

E-mail addresses: gregoriusrenervilota@gmail.com



mendukung keberlanjutan usaha melalui partisipasi aktif, sedangkan mitra usaha dan investor menjadi akselerator yang mendorong pertumbuhan bisnis desa. Sinergi yang baik di antara stakeholder menghasilkan keberlanjutan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan desa, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan inovasi dalam mengelola BUMDes menjadi faktor penting bagi perkembangan usaha desa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawan, E. R. (2006). Peran Ibu Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat. *Paper*.
- Handyaningrat, S. (1998). Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. *Gunung Agung*.
- Kartasmita, G. (2007). Administrasi Pembangunan. *Diakses Dari Wwww.Ginangar.Com*.
- Samosir, W. M., Agani, M. W., Puteri, N. H., Ardiansyah, F., & Lorang, F. D. (2026). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Pembangunan Ekonomi Lokal : Studi Kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera*. 16(1), 31–51. <https://doi.org/10.14710/politika.16.1.2026.31-51>
- Siagian, S. P. (2007). Administrasi Pembangunan : Kosep, Dimensio, dan Strateginya. *Bumi Aksara*.
- TIKSON, D. (2005). Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand: Keterbelakangan dan Ketergantungan. *Makassar: Inninawa*.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 9, Number 9, 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



*Corresponding author

E-mail addresses: gregoriusrenervilota@gmail.com